

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 211 ayat (1) disebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, kecamatan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penjabaran dukungan kecamatan terhadap pencapaian visi misi daerah tersebut tercermin dalam kecamatan beserta indikator kinerja sarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja PD) dan Anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- (i) Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan;
- (ii) Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan;
- (iii) Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan; dan
- (iv) Penetapan Renstra Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 01);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017 – 2022. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah untuk:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyanggah tugas fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka

mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya

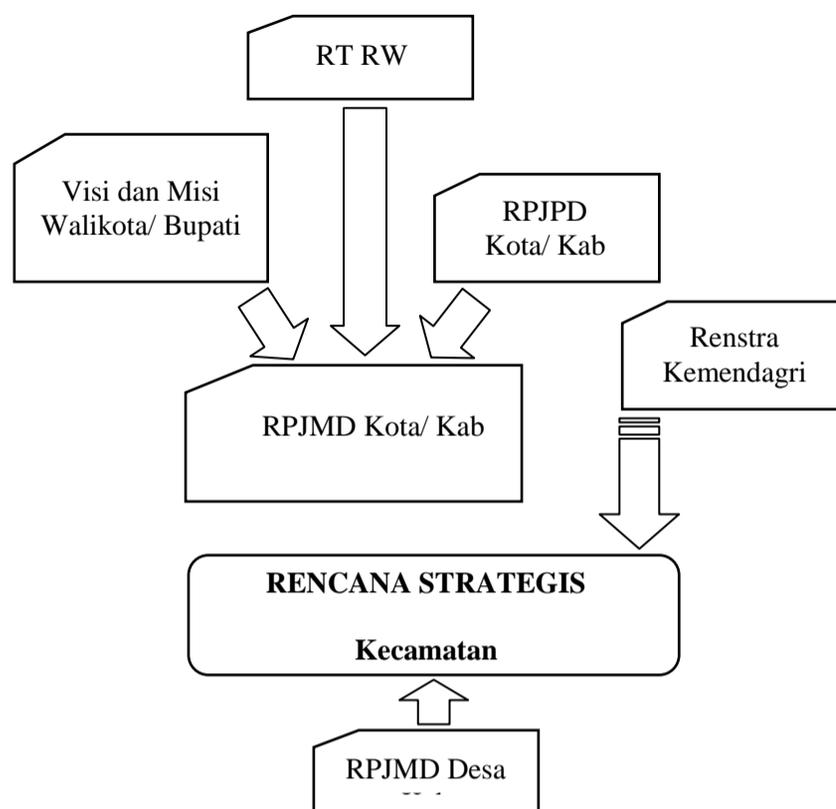
Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Rencana strategis Kecamatan memperhatikan RT RW kabupaten, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di kecamatan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenPati. Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rensta Kecamatan ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Rencana Strategis Kecamatan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan. Penyusunan Renstra Kecamatan memperhatikan RPJM Desa yang ada di wilayah kecamatan supaya terjadi koneksitas dan sinkronisasi program pembangunan kewilayahan.

Secara skematis keterkaitan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1. Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya

1.5. Sistematika

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya
- 1.5 Sistematika

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Bab III Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

BabVI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

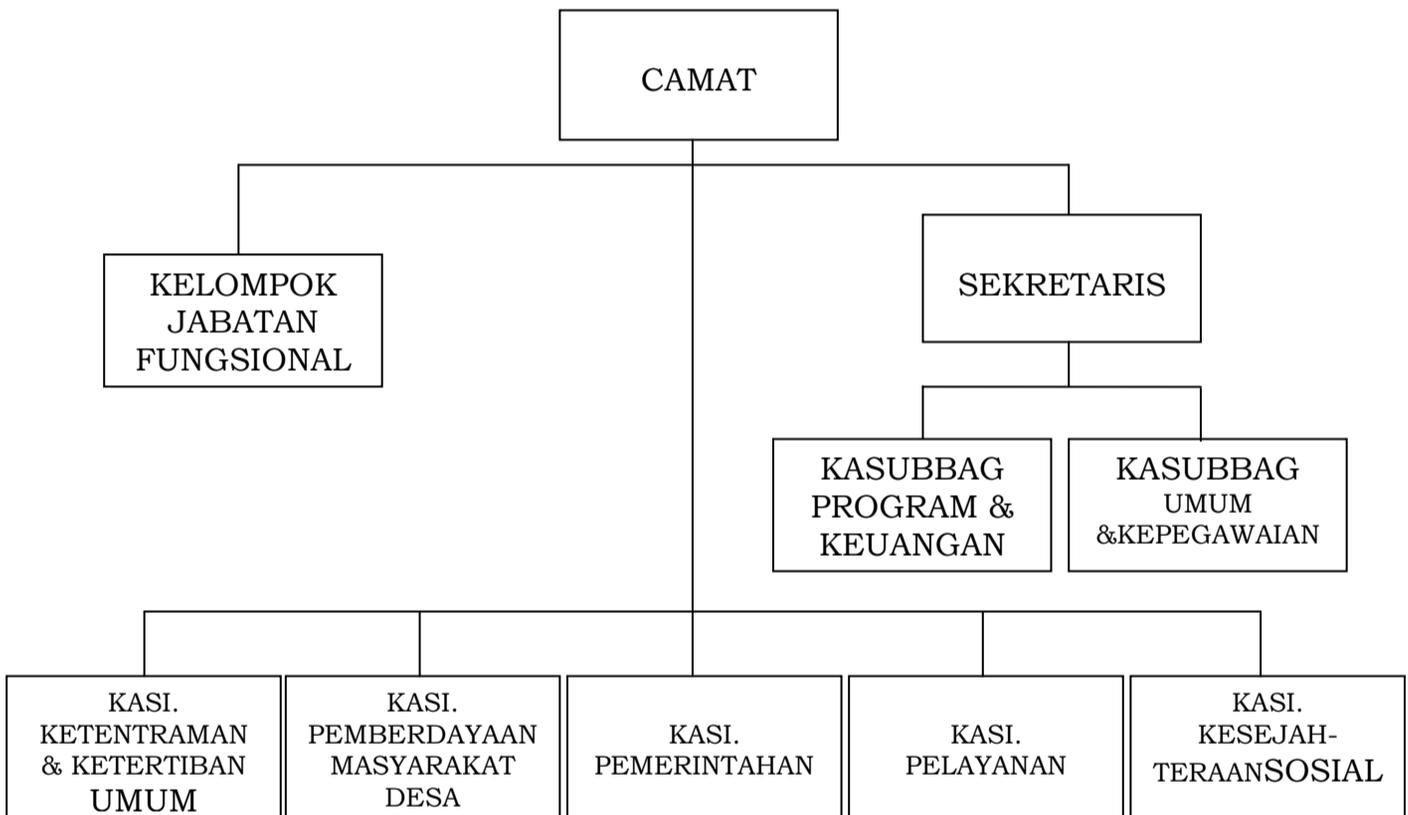
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gembong

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Gembong terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gembong

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan

		berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desamaupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara,

	<p>bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	--

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Gembong berjumlah 17 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Gembong	2		4	3	2	2	13	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	
	- Staf Subbag Program & keuangan	-	-	-	-	1	-	-	
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	1	-	
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	1	-	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	-	-	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2017

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumla h (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gembong	-	-	2	-	-	2	1	3	4	1	7	6

- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-Staf Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Staf Program & keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-Non PNS	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	9	unit		
		4	unit	Baik	
		5	unit	Kurang Baik	

	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	6	unit	3 baik, 3 kurang baik	
6	- Laptop	7	unit	5 baik, 2 kurang baik	
7	- Printer	6	unit	3 baik, 3 kurang baik,	
8	- Meja	20	unit	baik	
9	- Kursi	25	unit	20 baik, 5 kurang baik	
10	- AC	5	unit	4 baik, 1 rusak	
11	- Almari& filling cabinet	6	unit	baik	
12	- kipas angin	10	Unit	baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang, bendahara 1 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 10 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 6 unit dikarenakan 1 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor, 5 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 7 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka kedepan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke

depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 20 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 25 unit dengan 20 dalam kondisi baik dan 5 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 5 unit dengan 4 dalam kondisi baik dan 1 rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 2 unit lagi untuk ruang pelayanan dan mengganti AC yang rusak.

Kondisi jumlah almari dan filing cabinet di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 6 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 4 unit lagi untuk tempat arsip.

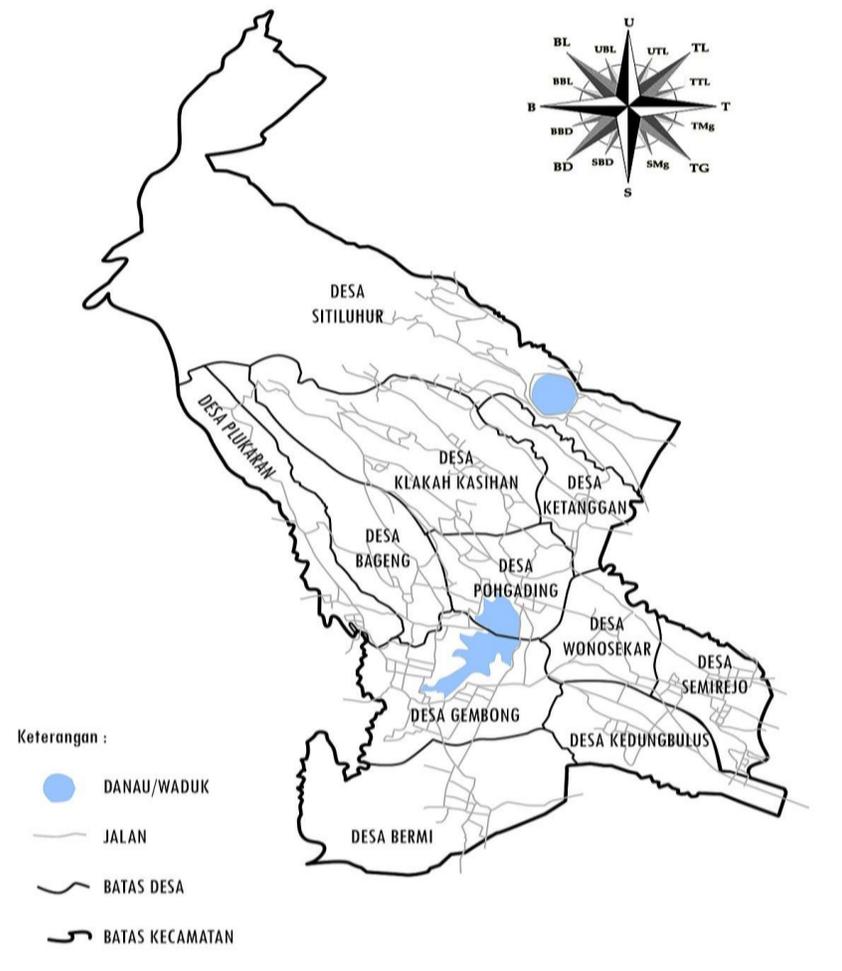
Kondisi jumlah kipas angin di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 10 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kipas angin lagi sebanyak 5 unit lagi untuk di ruang rapat.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Gembong

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Gembong merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.730 Ha. Secara administratif Kecamatan Gembong dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Tlogowungu dan Margorejo Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus



Peta Kecamatan Gembong

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Gembong dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.6
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Gembong

No	Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Bermi	768	33	10	
2	Kedungbulus	525	30	12	
3	Semirejo	561	27	8	
4	Wonosekar	326	10	3	
5	Gembong	829	60	15	
6	Plukaran	573	24	9	
7	Bageng	655	26	11	
8	Pohgading	399	15	7	
9	Klakahkasian	664	39	8	

10	Ketanggan	265	10	4	
11	Sitiluhur	1165	20	7	

Sumber: Kecamatan Gembong dalam angka 2017

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Gembong memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.441 jiwa, yang terdiri dari 23.051 jiwa laki-laki dan 23.390 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gembong tahun 2016 berjumlah 33.800 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 635 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Gembong digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.7

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Gembong

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-6	1.724	47	1.916	53	3.640	100
2	7-12	1.715	45	2.045	55	3.760	100
3	13-18	2.605	53	2.325	47	4.930	100
4	19-24	3.192	47	3.593	53	6.785	100
5	25-55	2.345	53	2.077	47	4.422	100
6	26-79	1.917	56	1.518	44	3.435	100
7	80 ke atas	9.553	49	9.916	51	19.469	100
	JUMLAH	23.051		23.390		46.441	

Sumber: Kecamatan Gembong dalam angka 2017

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Gembong sebagai berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Gembong

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	2.115	2.280	4.395	9,46%
2	Belum tamat SD/MI	1.842	1.809	4.795	10,32%
3	SD/MI	5.316	5.334	10.650	22,50%
4	SMP/MTs	8.105	8.350	16.455	33,43%

5	SMA/SMK/MA	5.150	4.898	10.048	21,63%
6	MAHASISWA	493	652	1.145	2,46%
7	Tidak Sekolah	30	67	97	0,2
	JUMLAH	23.051	23.390	46.441	100

Sumber:Kecamatan Gembong Dalam Angka 2017

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Gembong sebagai berikut

Tabel II.9

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Gembong

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Petani	3.880	3.270	7.150	15,39%
2	Mengurus rumah tangga	0	10.354	10.354	22,29%
3	Pengusaha	580	965	1.540	3,31%
4	Pengrajin industry kecil	260	190	450	0,96%
5	PNS	140	210	350	0,75%
6	TNI/Polri	100	0	100	0,02%
7	Perkebunan	170	175	345	0,74%
8	Pedagang	40	410	450	0,96%
9	Peternak	95	55	150	0,32%
10	Buruh Industri	150	0	150	0,32%
11	Nelayan	0	0	0	0,00%
12	Buruh Bangunan	246	0	246	0,52%
13	Buruh pertambangan	334	0	334	0,53%
14	Transportasi	33	0	33	0,07%
15	Karyawan swasta	228	174	402	0,86%
16	Wiraswasta	1.955	1.271	3.226	6,93%

Sumber: Kecamatan Gembong Dalam Angka, 2017

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Gembong sebagai berikut:

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Gembong

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	22.653	22.808	45.461	97,88%
2	Kristen	332	498	830	1,78%

3	Katolik	66	84	150	0,34%
4	Hindu	0	0	0	0,00%
5	Budha	0	0	0	0,00%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0,00%
	JUMLAH	23.051	23.390	46.441	100%

Sumber: Kecamatan Gembong Dalam Angka , 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Gembong didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Gembong dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.11
Angka Kriminalitas di Kecamatan Gembong

NO	Data Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus narkoba	0	0	0	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	0	0	0	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual/perlindungan anak/KDRT	7	2	4	0	1
4	Jumlah kasus penganiayaan	10	5	4	5	3
5	Jumlah kasus pencurian	8	4	8	6	12
6	Jumlah kasus penipuan	3		4	2	4
7	Jumlah kasus perbuatan tidak menyenangkan	2	2	1	2	2
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	30	13	21	15	22
9	Jumlah Penduduk	N/A	N/A	N/A	46.233	46.441
10	Angka Kriminalitas	N/A	N/A	N/A	4,95	4,73

Sumber Data Kepolisian Sektor Gembong Tahun 2017

(Rumus angka kriminalitas: Jumlah tindak Kriminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Gembong dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12
Data jumlah poskamling di Kecamatan Gembong

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Bermi	2	2	4
2	Bageng	1	0	1
3	Gembong	3	0	3
4	Kedungbulus	4	0	4
5	Ketanggan	7	0	7
6	Klakahkasian	2	6	8

7	Pohgading	3	2	5
8	Plukaran	1	0	1
9	Semirejo	0	3	3
10	Sitiluhur	7	0	7
11	Wonosekar	2	3	5
	Jumlah	32	16	48

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Gembong dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13
Data jumlah linmas di Kecamatan Gembong

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Bermi	23	0	23
2	Bageng	26	11	37
3	Gembong	32	19	51
4	Kedungbulus	18	9	27
5	Ketanggan	11	6	17
6	Klakahkasian	41	0	41
7	Pohgading	18	0	18
8	Plukaran	23	12	35
9	Semirejo	20	8	28
10	Sitiluhur	23	12	35
11	Wonosekar	23	1	24
	Jumlah	258	78	336

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Gembong periode

Tabel II.14
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Indikator Lainnya	Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Angka Kriminalitas		4,9		6,2	6,0	5,8	5,5	4,9	5,9	5,8	5,5	5,3	4,7	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		66,16		59	61	63	64	66	58	60	62	63	64	0,98	,970	0,98	0,99	0,98
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		76,78		69	70	72	74	76	68	69	71	73	75	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		47		40	45	46	47	47	39	43	44	45	45	0,96	0,98	0,97	0,97	100
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	7	4	5	5	6	7	2	3	3	4	5	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	38	33	34	36	36	38	32	33	34	35	35	0,9	0,92	0,93	0,94	0,95
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	7	3	3	4	7	7	2	3	4	5	5	0,96	0,96	0,97	0,98	0,99
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72	64	66	68	70	72	62	64	66	68	70	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	62	54	56	58	60	62	52	54	56	58	60	0,92	0,92	0,93	0,94	0,95
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100	94	96	97	98	100	92	94	96	98	100	0,97	0,98	0,99	0,98	0,99

13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	90		92	94	96	98	90	93	94	94	96	98	0,9 7	0,98	0,9 9	0,9 8	0,99
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	70		62	63	66	68	70	61	63	66	68	68	0,9 6	0,96	0,9 7	0,9 8	0,98
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	90		72	77	82	87	90	71	76	81	86	90	0,9 5	0,96	0,9 7	0,9 8	0,99

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Gembong sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013,2014,2015,2016 dan 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gembong sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.15

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.604	188.409	139.422	145.228	187.656	NA	184.552	134.163	144.089	179.558	NA	97,95	96,22	99,21	97	8,22	7,5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.068	33.125	163.904	158.305	70.259	NA	33.125	158.305	158.305	70.126	NA	100	96,58	100	99	40	38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	8.370	14.975	11.200	11.200	NA	7.800	14.975	11.200	10.000	NA	93,18	100	100	89	25	25
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	13200	8.385	0	NA	0	13.200	8.385	0	NA	0	100	100	0	-63,52	-63,52
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	3.543	3.700	497	815	NA	3.543	3.700	497	815	NA	100	100	100	100	4,43	4,43
Program Penataan Administrasi Kependudukan	65.900	49.160	44.311	18.461	1.291	NA	49.160	44.311	18.461	1.291	NA	100	100	100	100	-74,76	-74,76

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	0	6.480	8.039	1.019	941	NA	6.480	8.039	1.019	941	NA	100	100	100	100	4	4
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	0	12.000	24.000	43.118	42.628	NA	12.000	24.000	43.118	42.628	NA	100	100	100	100	100	100
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	31.216	25.450	7.216	2.287	NA	31.216	25.450	7.216	2.287	NA	100	100	100	100	-81,52	-81,52
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	0	6.000	9.214	10.400	10.427	NA	6.000	9.214	10.400	10.423	NA	100	100	100	99	53,56	53,56
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	13.077	13.950	14.600	14.693	NA	13.077	13.950	14.600	14.693	NA	100	100	100	100	6,67	6,67
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	0	47.500	30.700	20.525	70.775	NA	47.500	30.700	20.525	68.240	NA	100	100	100	100	-54,55	-54,55

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gembong

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Gembong merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Gembong kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) sebagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun kedepan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;

- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.I
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan Masih rendahnya tingkat poskamling dan linmas aktif	Rasio Poskamling dan anggota linmas yang belum sesuai
2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (Rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa Belum optimalnya penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) kepada masyarakat desa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		penanggulangan kemiskinan	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standard pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;

2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati Pati Tahun 2017-2022

” MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Misi Bupati Pati Tahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, Kecamatan Gembong menghadapi beberapa tantangan isu strategis untuk mewujudkan Pati yang lebih sejahtera

Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan sebagai fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan.

Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan kebaruan data. Tantangan ini berkenaan dengan koordinasi manajemen pemantauan hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan melalui pengumpulan dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait kelompok sasaran pembangunan di kecamatan Gembong.

Selain membantu koordinasi pengumpulan data dan penyimpanan data, kecamatan juga membantu koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Gembong juga berkontribusi mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih kabupaten Pati periode 2017-2022 melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan factor pendorong sebagai berikut:

- a. Anggaran Dana Desa yang besar dari pemerintah pusat
- b. Usaha UMKM yang mulai tumbuh di wilayah kecamatan

Sedangkan yang merupakan factor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah yang luas dan kondisi alam yang berupa pegunungan yang menyulitkan koneksifitas antar penduduk
- b. Penduduk yang masih banyak hidup miskin
- c. Sarana dan prasarana jalan yang masih kurang layak

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran:

- (i) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- (ii) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan:

- a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu (i) bagaimana mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa; (ii) memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
 - i. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - ii. Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - iii. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - iv. Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - v. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM

- d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator: (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel; (iii) Jumlah desa swasembada.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan factor pendorong sebagai berikut:

- a. Sikap toleransi dari masyarakat yang sudah baik
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik

Sedangkan yang merupakan factor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. SDM di kecamatan yang masih kurang pegawai
- b. Anggaran di kecamatan yang kurang memadai
- c. Sarana dan prasarana pelayanan public yang kurang representatif

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010 – 2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.

Rencana pembangunan sarana kewilayahan yang direncanakan di seluruh kecamatan antara lain:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan, secara khusus yang bersumber dari energi alternatif;
- b. Pembangunan Taman Skala Kecamatan

Selain target pembangunan umum tersebut, di wilayah kecamatan Gembong ditargetkan sebagai lokasi pembangunan:

- a. peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Muria, lahan-lahan yang memiliki tingkat kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor atau erosi dengan melakukan penghijauan lereng Gunung Muria di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Gunungwungkal.
- b. Pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang umum
- c. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melalui wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo;
- d. Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi
- e. Pengembangan pertanian hortikultura
- f. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan
- g. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan (Potensi bahan tambang tras dan sirtu)
- h. Pengembangan pariwisata alam (kawasan agrowisata berada di sepanjang lereng Gunung Muria bagian timur).

Kajian RTRW kabupaten Pati tahun 2010 – 2030 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Gembong dalam proses perencanaan, implementasi, hingga merawat hasil pembangunan di kecamatan Gembong.

Kecamatan Gembong ditantang untuk menjaga kewaspadaan masyarakat untuk siaga mitigasi bencana alam terutama bencana erosi dan tanah longsor yang sering terjadi di Kecamatan Gembong mengingat lokasi di lereng Gunung Muria dengan tingkat kemiringan antara 25 – 40 derajat.

Pengembangan industri di Kecamatan Gembong terutama industri kayu sengon dan kayu jati yang banyak menyerap tenaga kerja, juga dikembangkan pula industri mikro dan UMKM yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat Gembong.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis untuk penyusunan Rencana Strategis Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial di kecamatan mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus di Kecamatan Gembong terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pati tahun 2016 sebagai berikut.

1. Kecamatan Gembong termasuk daerah yang rawan tanah longsor.
2. Kecamatan Gembong sebagai wilayah yang diproyeksikan berkembang di bidang kawasan hutan produksi,

Kajian KLHS Kabupaten Pati tahun 2016 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Gembong untuk berpartisipasi dalam menjaga perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan yang membahayakan degradasi kesehatan lingkungan.

3.4.3 Faktor Pendorong dan Penghambat

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa factor pendorong di antaranya sumber daya alam yang melimpah dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia.

Sedangkan factor penghambatnya adalah kondisi alam pegunungan yang menyebabkan kecamatan Gembong termasuk daerah rawan longsor serta masih banyaknya warga yang hidup miskin.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Gembong

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Kecamatan Gembong Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Menjadi kewenangan kecamatan; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Gembong. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang

eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal.

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Gembong melalui Perda Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pati nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pati. Regulasi tersebut memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- b. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Pati untuk mendorong peran kecamatan melaksanakan kewenangan yang diserahkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Kelemahan Internal.

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian; (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya; (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi; (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat; (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbaru.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
- c. Kurangnya optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan, terutama dari sisi pengelolaan anggaran.

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;

4. Peluang dari lingkungan eksternal

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN
2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan masyarakat;
3. Berkembangnya teknologi informasi.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil telaahan visi dan misi kepala daerah, hasil telaahan pada rencana strategis kementerian, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan public, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah serta koordinasi lintas sector di kecamatan.
2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
3. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuannya itu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Gembong yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat diwilayah kecamatan dengan sasaran: meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Gembong, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - b. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat diwilayah kecamatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

Lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gembong Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel IV.1 dibawah ini:

Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN GEMBONG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Angka Kriminalitas	6,2	6,0	5,8	5,5	4,9
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase poskamling aktif	59%	61%	63%	64%	66%
			Persentase anggota Linmas aktif	70%	72%	74%	76%	78%
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Gembong		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%	46%	47%	47%
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	5%	5%	6%	7%

		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	40%	50%	60%	70%	75%
		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	3%	3%	4%	7%	7%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	64%	66%	68%	70%	72%
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	54%	56%	58%	60%	62%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepatwaktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Gembong

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik			
Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Revitalisasi peran dan fungsi poskamling.
			Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Optimalisasi peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Pengembangan data/Informasi	Optimalisasi keterisian data monografi dan profil kecamatan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Optimalisasi desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Non Urusan																				
		4.0 8.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%`	211.808	100%	295.823	100%	325.000	100%	335.975	100%	357.000	100%	1.525.606	Kecamatan Gembong		
		4.0 8.1 8.0 1.0 001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	500surat	500 surat	1.500	750 Surat	3.000	900 surat	3.750	1000 surat	4.000	1.200 surat	4.500	4.350 surat	16.750	Kecamatan Gembong		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 1.0 002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36 rekening	30.000	36 rekening	30.000	36 rekening	30.000	36 rekening	30.000	36 rekening	30.000	180 rekening	150.000	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 1.0 03	Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama setahun	7 unit	7 unit	4.760	13 unit	8.840	13 unit	9.724	13 unit	10.696	13 unit	11.766	59 unit	45.786	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 1.0 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	10 kendaraan dinas	10 kendaraan dinas	2.750	10 kendaraan dinas	5.500	11 kendaraan dinas	6.050	12 kendaraan dinas	6.655	13 kendaraan dinas	7.320	56 kendaraan dinas	28.275	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 1.0 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun	2 orang	24 orang	25.832	24 orang	33.162	24 orang	36.478	24 orang	40.125	24 orang	44.138	120 orang	179.735	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 1.0 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	60 rim, 750 buah, 50 botol, 20 dos	60 rim, 750 buah, 50 botol, 20 dos	10.389	120 rim, 900 buah, 60 botol, 30 dos	23.686	132 rim, 910 buah, 60 botol, 30 dos	26.055	144 rim, 920 buah, 60 botol, 30 dos	28.660	156 rim, 930 buah, 60 botol, 30 dos	31.526	612 rim, 4410 buah, 290 botol, 140 dos	120.316	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 1.0 11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun	360 buah, 24 buku, 6.058 lembar	360 buah, 24 buku, 6.058 lembar	1.582	720 buah, 48 buku, 60.000 lembar	12.662	720 buah, 48 buku, 61.000 lembar	13.928	720 buah, 48 buku, 62.000 lembar	15.320	720 buah, 48 buku, 63.000 lembar	16.852	3240 buah, 216 buku, 2520 lembar	60.344	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 1.0 12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	55 buah	55 buah	2.340	60 buah	14.044	60 buah	15.448	60 buah	16.992	60 buah	18.692	295 buah	67.516	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 1.0 13	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun				20 jenis	4.988	60 jenis	12.000	65 jenis	14.000	70 jenis	16.000	215 jenis	46.988	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 1.0 15	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun	12 eksemplar	24 eksemplar	1.386	24 eksemplar	5.544	24 eksemplar	6.098	24 eksemplar	6.707	24 eksemplar	7.378	108 eksemplar	27.113	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 1.0 16	Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun	2.196 liter	2.196	17.897	2.250	20.297	2.300	22.327	3.600 liter, 150 dos, 72 galon, 90 kg, 90 pak	24.559	3.600 liter, 150 dos, 72 galon, 90 kg, 90 pak	27.015	13946 liter, 150 dos, 72 galon, 90 kg, 90 pak	112.095		Kecamatan Gembong
		4.0 8.0 4.0 1.0 17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai selama setahun	36 galon, 12 doos	36	984	48 galon, 24 doos	3.624	60 galon, 36 doos	3.986	60 galon, 36 doos	4.384	60 galon, 36 doos	4.822	264 galon, 144 doos	17.800		Kecamatan Gembong
		4.0 8.0 4.0 1.0 18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun	12 notulenrapat, 420 laporanperjalanan	12	73.710	12 notulenrapat, 420 laporanperjalanan	73.710	12 notulenrapat, 420 laporanperjalanan	73.710	12 notulenrapat, 420 laporanperjalanan	73.710	12 notulenrapat, 520 laporanperjalanan	78.431	60 notulenrapat, 2200 laporanperjalanan	373.271		Kecamatan Gembong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 1.0 19	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun	3 orang	36 orang	1.836	48 orang	3.672	48 orang	4.039	48 orang	4.442	48 orang	4.886	228 orang	18.875	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 1.0 22	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	5 orang	60 orang	36.840	60 orang	36.570	60 orang	40.227	60 orang	44.249	60 orang	48.674	300 orang	206.560	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	65%	70%	30.509	73%	45.000	76%	50.000	78%	70.000	80%	90.000	80%	285.509	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 2.0 14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun						1 unit	20.000	1 unit	20.000	1 unit	20.000	3 unit	60.000	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 2.0 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun	3 unit	3 unit	9.537									3 unit	9.537	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 2.0 16	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah komulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun						2 unit	24.868	1 unit	15.000	1 unit	20.000	4 unit	59.868	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 2.0 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Camat	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama setahun	1 unit	1 unit	2.024	1 unit	11.314					1 unit	15.663	3 unit	26.977	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 2.0 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun				2 unit	14.738			2 unit	19.408	1 unit	9.157	5 unit	43.303	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 2.0 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun	10 unit pemeliharaan	10 unit pemeliharaan	18.948	10 unit pemeliharaan	18.948	11 unit pemeliharaan	21.312	12 unit pemeliharaan	22.891	13 unit pemeliharaan	25.180	56 unit pemeliharaan	107.279	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja	88%	90%	10.000	91%	12.000	92%	15.000	93%	20.000	94%	23.000	94%	80.000	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 3.0 02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun	25stel	25stel	10.000	25stel	10.000	27stel	12.500	27stel	17.000	27stel	19.500	131stel	69.000	Kecamatan Gembong	
			Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun				12 laporan	2.000	12 laporan	2.500	12 laporan	3.000	12 laporan	3.500	48 laporan	11.000	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 6	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100%	2.995	100%	14.000	100%	16.898	100%	20.000	100%	24.487	100%	78.380	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 6.0 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	12 dokumen	12 dokumen 560	12 dokumen 3.735	12 dokumen 5.606	12 dokumen 7.581	12 dokumen 10.825	60 dokumen 28.307							Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 6.0 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 dokumen	1 dokumen 1.232	1 dokumen 2.708	1 dokumen 2.979	1 dokumen 3.276	1 dokumen 3.604	5 dokumen 13.799							Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 6.0 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi renja triwulan yang disusun selama setahun	2 dokumen dan 4 laporan evaluasi	2 dokumen, 4 laporan evaluasi 677	2 dokumen, 4 laporan evaluasi 4.931	2 dokumen, 4 laporan evaluasi 5.424	2 dokumen, 4 laporan evaluasi 5.966	2 dokumen, 4 laporan evaluasi 6.563	10 dokumen, 20 laporan evaluasi 23.561							Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.0 6.0 06	Penyusunan rencana kerja anggaran(RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD	4 dokumen	4 dokumen	525	4 dokumen	2.626	4 dokumen	2.889	4 dokumen	3.177	4 dokumen	3.495	20 dokumen	12.712	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.0 6.0 10	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra)PD	1 dokumen					1 dokumen	5.012			1 dokumen	5.870	2 dokumen	10.882	Kecamatan Gembong	
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki pedulianso sialdanber martabatd iwilayahKecamatan				Angka Kriminalitas	6,1	5,08	51.711	4,67	76.012	4,27	77.000	3,86	85.000	3,05	87.000	3,05	376.723	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	4.0 8.1 6	Program Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah desa	3,9	4,2	51.711	4,5	76.012	4,8	77.000	5,1	85.000	5,5	87.000	5,5	376.723	Kecamatan Gembong		
				Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,03	0,031		0,032		0,033		0,034		0,035		0,035		Kecamatan Gembong		
		4.0 8.0 4.1 6.0 06	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	1 Laporan	51.711	1 Laporan	76.012	1 Laporan	77.000	1 Laporan	85.000	1 Laporan	87.000	5 Laporan	376.723	Kecamatan Gembong		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Gembong				Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		Kecamatan Gembong	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Gembong	
				Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	6%		8%		9%		11%		12%		12%		Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	4.0 8.1 8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	40%	26.656	50%	45.000	60%	50.000	70%	50,977	75%	53.000	75%	225.633	Kecamatan Gembong	
				Persentase PKK desa aktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%		Kecamatan Gembong	
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%		Kecamatan Gembong	
				Persentase RT/RW aktif	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%		Kecamatan Gembong	
				Persentase Posyandu aktif	75%	78%		80%		83%		87%		90%		90%		Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.1 8.0 04	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembagadan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12 laporan	26.656	12 laporan	45.000	12 laporan	50.000	12 laporan	50.977	12 laporan	53.000	60 laporan	225.633	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	4.0 8. 22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	100%			100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	20.000	100%	80.000		Kecamatan Gembong
				Persentase penyaluran PKH	100%			100%		100%		100%		100%		100%			Kecamatan Gembong
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%			100%		100%		100%		100%		100%			Kecamatan Gembong
		4.0 8.0 4.2 2.0 01	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	20.000	48 Laporan	80.000		Kecamatan Gembong						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	4.0 8.2 1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	15.965	75%	29.000	78%	31.000	80%	35.000	82%	40.000	82%	150.965	Kecamatan Gembong	
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%		85%		87%		90%		92%		92%		Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.2 1.0 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.965	2 Dokumen	29.000	2 Dokumen	31.000	2 Dokumen	35.000	2 Dokumen	40.000	12%	150.965	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	52%	60%	11.668	65%	19.000	70%	25.000	75%	28.000	80%	35.000	80%	118.668	Kecamatan Gembong	
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%		Kecamatan Gembong	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	4.0 8.2 0	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	11.668	100%	19.000	100%	25.000	100%	28.000	100%	35.000	100%	118.668	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.0 8.0 4.2 0.0 10	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	60 dokumen izin	60 dokumen izin	11.668	80 dokumen izin	19.000	90 dokumen izin	25.000	100 dokumen izin	28.000	110 dokumen izin	35.000	440 dokumen izin	118.668	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.1 7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	23.937	100%	36.500	100%	38.457	100%	39.177	100%	40.000	100%	178.071	Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.1 7.0 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	5400 dokumen kependudukan	5400 dokumen kependudukan	23.937	5600 dokumen kependudukan	36.000	5700 dokumen kependudukan	38.457	5800 dokumen kependudukan	39.177	5900 dokumen kependudukan	40.000	28400 dokumen kependudukan	178.071	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terpenuhiya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	4.0 8.1 5	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi kecamatan	75%	78%	5.373	80%	10.441	82%	13.000	84%	18.799	86%	24.820	86%	72.433	Kecamatan Gembong	
				Persentase keterisian data profilkecamatan	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.1 5.0 06	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2 dokumen	5.373	2 dokumen	10.441	2 dokumen	13.000	2 dokumen	18.799	2 dokumen	24.820	10 dokumen	72.433	Kecamatan Gembong	
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	4.0 8.1 9	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	11.521	92%	32.000	93%	35.000	94%	39.000	95%	45.000	95%	162.521	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%		Kecamatan Gembong	
		4.0 8.0 4.1 9.0 04	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	3 laporan / rekomendasi	3 laporan / rekomendasi	11.521	3 laporan / rekomendasi	32.000	3 laporan / rekomendasi	35.000	3 laporan / rekomendasi	39.000	3 laporan / rekomendasi	45.000	15 laporan / rekomendasi	162.521	Kecamatan Gembong	
Jumlah							402.147		623.264		691.355		757.751		840.177				

BAB VII**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Kecamatan Gembong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel VII.1.

Tabel VII.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INDIKATOR TUJUAN 1							
1	Angka Kriminalitas	6,2	6,2	6,0	5,8	5,5	4,9	4,9
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase Poskamling aktif	59%	59%	61%	63%	64%	66%	66%
	Persentase Linmas aktif	70%	70%	72%	74%	76%	78%	78%
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio poskamling aktif	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,5	5,5
	Rasio anggota linmas aktif	0,03	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,035
2	INDIKATOR TUJUAN 2							
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	4%	5%	5%	6%	7%	8%	8%
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	30%	40%	50%	60%	70%	75%	75%
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase LPMD aktif	60%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
	Persentase PKK desa aktif	80%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
	Persentase Karang Taruna aktif	70%	70%	72%	74%	76%	78%	78%
	Persentase RT/RW aktif	80%	80%	84%	86%	88%	90%	90%
	Persentase Posyandu aktif	80%	80%	82%	84%	86%	88%	88%
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase penyaluran rastra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	5%	5%	6%	7%	8%	9%	9%
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	75%	77%	79%	82%	85%	88%	88%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	70%	72%	74%	77%	80%	85%	85%
3	INDIKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	64%	66%	68%	70%	72%	75%	75%
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	50%	60%	65%	70%	75%	75%
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	50%	60%	65%	70%	75%	75%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	50%	60%	65%	70%	75%	75%
3.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	72%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	60%	60%	62%	64%	66%	68%	68%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	70%	70%	72%	74%	76%	78%	78%

BAB VIII

PENUTUP

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah.
2. Optimalisasi partisipasi di wilayah Kecamatan harus terus memacu , terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
5. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati di Kecamatan Gembong.
6. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI PATI,

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010